

# ALFONSIANA

Buletin STUDENTAT REDEMPTORIS

## SPIRITUALITAS

**"Korban nyawa jadi taruhannya. Bagaimana kita bisa menggali spiritualitas dari relasi sepele ini?"**

## CINTA DAN POLITIK

**"Lantas bagaimana dengan mereka yang memiliki kinerja yang baik, tapi berasal dari ras atau agama yang notabenenya minoritas?"**

## AGAMA & NEGARA

**"Jika agama hanya soal kepuasan dan kesucian pribadi saja, mungkin peristiwa Salib yang Aku alami - di mana 'negara' ikut menentukan hidup-Ku dan menghukum-Ku - mungkin tak ada maknanya lagi bagimu!" - Yesus**

# PERAN AGAMA DALAM PESTA DEMOKRASI



<b>1</b>	<b>PENA REDAKSI</b>	
	Pesta Demokrasi Menantang Mediasi Agama Dan Negara	2
<b>2</b>	<b>SPIRITUALITAS</b>	
	Mengais Remah-Remah Spiritualitas Dari Peliknya Relasi Agama dan Politik	3
<b>3</b>	<b>SAJIAN UTAMA</b>	
	Agama dan Negara	7
	Doa di Kotak Suara	11
<b>4</b>	<b>REFLEKSI</b>	
	Moral Agama Menolong Eksistensi Demokrasi	14
<b>5</b>	<b>TEOLOGI</b>	
	Peran Umat Katolik Dalam Pesta Demokrasi	16
	Patriotisme: Membangun Kepercayaan Umat Kristiani kepada Negara sebagai Masyarakat Demokrasi dalam Perspektif Injil Matius 22:15-21	20
<b>6</b>	<b>TEROPONG</b>	
	Bersuara dengan Hati dan Pikiran	24
<b>7</b>	<b>FILSAFAT</b>	
	Agama dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas: Eksistensi Agama dalam Dinamika Politik Menjelang Pesta Demokrasi	27
	Masyarakat Post-sekuler, Agama dan Demokrasi	32
<b>8</b>	<b>CERPEN</b>	
	Nasi Goreng	36
	Antara Cinta dan Kritis	38
<b>9</b>	<b>PUISI</b>	
	Antologi Puisi	41
<b>10</b>	<b>KRONIK</b>	
		43
<b>11</b>	<b>KARIKATUR</b>	
		46





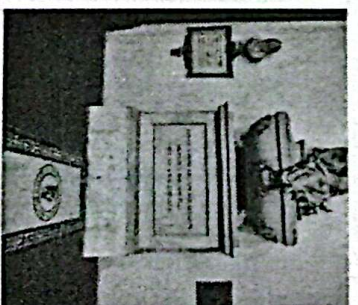


**Rm. Nikolas Kristiyanto S.I.**  
(Dosen Teologi Wedabhakti  
Universitas Sanata Dharma)

# AGAMA & NEGARA

Agama dan Negara merupakan sebuah “relasi antik” yang telah ribuan tahun usianya. Kadang harmonis, kadang mengganggu. Agama dan Negara tidak bisa dipisahkan begitu saja. Bagaimana sebuah pasangan hidup yang kadang saling membutuhkan, tapi kadang juga saling membenci. Kadang saling merindu, kadang ingin berjauhan. Inilah kisah mengenai agama dan negara, yang selalu dinamis – naik-turun dan tak tahu apa ujungnya.

Melihat kompleksitas relasi antara agama dan negara, saya berusaha melihatnya dalam pandangan tiga pemikir besar dunia, yaitu Machiavelli, Kant, dan Montesquieu. Mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran agama dalam negara. Tulisan ini merupakan pemikiran lama yang pernah saya muat di blog saya sendiri (2012) dan sekarang ingin saya bagikan ulang dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini (2023).



**Machiavelli**  
(<https://th.gy/b/72113>)



### Machiavelli: Negara Mendominasi Agama

Machiavelli memiliki pandangan bahwa agama hanyalah alat untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan negara. Bagi Machiavelli, agama adalah sekadar sarana pragmatis, bukan masalah moral atau spiritual. Manusia, menurutnya, pada dasarnya buruk, dan penguasa perlu bertindak sesuai dengan kepentingan negara, baik dengan cara baik maupun jahat. Agama hanya digunakan jika mendukung kepentingan negara, dan bisa ditinggalkan jika tidak relevan. Bagi Machiavelli, negara harus mendominasi agama.

Kita mendapat kesan bahwa Machiavelli membenarkan segala cara untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan, termasuk memanipulasi agama. Namun, Machiavelli sebenarnya tidak pernah merumuskan patokan "moral" bahwa "tujuan menghalalkan cara". Ia hanya bermaksud mengemukakan apa yang bermanfaat bagi yang berkuasa dengan menggunakan metode penyelidikan obyektif tanpa embel-embel moral atau agama. Di sini, Machiavelli sebenarnya ingin mengungkapkan adanya dua moralitas, yaitu (1) moralitas jiwa (agama), dan (2) moralitas negara (politik). Machiavelli melihat bahwa sepanjang perjalanan sejarah, kedua moralitas ini selalu berjalan berdampingan sekaligus berkonflik. Baginya, keduanya patut untuk dianalisis secara obyektif. Menurut Machiavelli, dalam urusan kehidupan bernegara, moralitas sekuler, seperti kepahlawanan, kekuatan senjata, kekerasan, melanggar janji, dan kebesaran kekuasaan itu bisa diterima. Berdasarkan moralitas itulah tindakan penguasa itu dinilai: (a) Baik, jika mengutamakan penguasa; (b) Buruk, jika merugikan penguasa. Dalam arti itu pula, otonomi politik diterima (ST. Sularto, 2003). Di sini, moralitas jiwa (agama) dapat digunakan sejauh mendukung moralitas negara (politik).

Jika memandang pemikiran Machiavelli dalam tahun politik saat ini, di mana banyak partai mulai sibuk memilih capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden), kita bisa melihat partai mana yang memilih menggunakan cara Machiavelli, yaitu mulai mengampayekan capres dan cawapresnya dengan menggunakan bahasa-bahasa agama. Jika ada partai selalu menggunakan identitas agama tertentu, meng-

gunakan ayat-ayat suci dalam kampanye, meminta nasihat dan restu dari para pemimpin agama untuk mendapatkan legitimasi agama tertentu, bahkan menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Maka, dengan jelas kita bisa mengatakan bahwa cara Machiavelli mulai digunakan di sini, agama jelas digunakan untuk mendapatkan kekuasaan politik orang per orang atau kelompok tertentu untuk berkuasa. Agama tidak lain hanya sebagai "alat politik" sejauh dapat bisa membantu mereka naik ke kursi panas kepemimpinan negara.

### Kant: Negara Menguji Agama di Hadapan Publik

Setelah Machiavelli, mari kita coba masuk dalam dunia pemikiran Kant. Kant berpandangan bahwa manusia itu merupakan makhluk "sosial yang asosial" (*Ungesellige Geselligkeit*).



Emanuel Kant  
(<https://rb.gy/wbltrn>)

Di satu sisi mereka memperhatikan yang lain (sosial) Namun, pada saat yang bersamaan secara diam-diam mereka cenderung mengesualikan diri dari yang lain (asosial). Antagonisme inilah yang selalu mewarna kehidupan relasi manusia. Bagi Kant, inilah state of nature (keadaan asli) manusia, yaitu state of war – d mana permusuhan atau perang potensial terjadi. Jika manusia hanya memiliki dorongan sosial, maka mereka akan tergiring dalam massa, kerumunan, atau gerombolan. Tapi sebaliknya, jika manusia hanya memiliki dorongan individualitas, maka tidak akan ada komunitas atau masyarakat (Fitzgerald K Sitorus, 2003). Jadi, ketegangan antara keduanya merupakan sebuah kekuatan yang memungkinkai manusia menjadi individu (bebas) sekaligus dapat berpartisipasi dalam komunitas.



Kant menganggap bahwa negara seharusnya memfasilitasi kebebasan individu melalui hukum universal yang steril dari pengaruh moral dan agama. Bagi Kant, negara adalah alat untuk memediasi konflik dan memastikan kebebasan individu. Agama, dalam pandangan Kant, tidak harus terlibat dalam urusan negara, kecuali jika nilai-nilainya diakui secara universal dan terbuka bagi semua.

Kant percaya bahwa masalah pendirian negara dapat diselesaikan bahkan oleh sebuah "bangsa setan-setan" (jika mereka hanya memiliki akal) (F. Budi Hardiman, 2007). Artinya, sebuah negara akan terbentuk jika kegoisan manusia tidak sampai merugikan kebersamaan. Itulah mengapa serigala atau bahkan setan sekalipun (sejauh mereka memiliki akal) dapat mendirikan sebuah negara karena pendirian sebuah negara bersifat rasional-strategis. Maka, jelaslah bahwa agama tidak lagi penting dalam sebuah negara Kantian. Negara tidak ikut campur dalam urusan agama.

Kemudian, yang menjadi persoalan adalah bahwa ternyata masyarakat merupakan suatu *Lebenswelt* (dunia-kehidupan) yang melibatkan penghayatan nilai moral, kultural, dan religius (F. Budi Hardiman, 2005). Lalu pertanyaannya, "Apakah dalam pemikiran Kant agama tidak memiliki peluang lagi untuk berperan di dalam negara?"

Dengan mengikuti alur pemikiran Kant, agama tampaknya masih memiliki peluang untuk dapat berperan dalam kehidupan bersama (negara) dan diperhitungkan dalam suatu tatanan hukum. Hal itu dapat terjadi jika nilai-nilai agama itu sendiri telah melewati uji kelayakan terlebih dahulu lewat asas kepublikan, yakni apakah nilai-nilai agama itu dapat diterima dengan tulus oleh pihak-pihak lain secara universal atau tidak. Maka, negara lebih memberi tantangan bagi setiap agama untuk menunjukkan bahwa agamanya bersifat terbuka, memiliki horizon kemanusiaan yang dapat diterima segala lapisan dan golongan, termasuk "setan-setan" yang tak beragama. Di sini, "hospitalitas" untuk menerima "yang lain" menjadi unsur penting di dalam sebuah agama melalui sebuah tawaran nilai-nilai universal (F. Budi Hardiman, 2005). Jadi, negara lebih memberi peluang bagi agama

untuk mengikuti "fit and proper test" secara terbuka di hadapan publik jika agama ingin serius ikut berperan (menjadi dasar) dalam kehidupan politik. Namun, jika terbukti tidak lolos apalagi tidak lulus, saya membayangkan bahwa Kant akan tersenyum dan mengatakan, "Berbesar hatilah! Karena memang 'setan-setan' ternyata tidak butuh agama."

Dalam konteks Indonesia, jika ternyata institusi agama tidak bisa dirasakan lagi manfaatnya bagi banyak orang, khususnya mereka yang lemah dan tersekitir, maka agama hanya menjadi garam yang hampar dan tak berguna lagi. Dalam situasi seperti itu, saya membayangkan jika Kant masih hidup sekarang ini, maka ia akan berkata kepada kaum agamawan, "Pergilah..! Biarlah 'setan-setan' rasional itu memimpin negaramu!"

**Montesquieu dan Hannah Arendt: Negara Memahami Agama sebagai Lembaga Intermedier**

Pandangan antropologis Montesquieu mengenai kodrat manusia pada dasarnya adalah baik (positif). Meskipun manusia memiliki rasa takut dan menyebabkan mereka untuk saling menjauh satu sama lain. Namun, mereka kiranya segera bergerak mendekat bila menerka gerak-gerik dan air muka orang lain dan menyadari bahwa ternyata rasa takut itu timbal-balik. Lagi pula pendekatan itu menimbulkan rasa senang di antara mereka. Berbeda dengan Hobbes, Montesquieu tidak berpusat pada rasa "takut yang mempersatukan",



Montesquieu  
(<https://rb.gy/68v03b>)



Hannah Arendt  
(<https://rb.gy/4ca5p7>)



melainkan ia lebih melihat pada rasa senang yang muncul dari kebersamaan. Konsep Montesquieu ini membawa sebuah harapan akan perdamaian, sebuah sikap kooperatif. Kecenderungan untuk saling mendekat itu memunculkan suatu bentuk keinginan untuk hidup bersama dalam masyarakat (F. Budi Hardiman, 2007). Dalam pemikirannya, Montesquieu masih memberi ruang bagi rasa empati dan altruisme dalam kehidupan bersama. Dalam relasinya dengan yang lain, menurut Montesquieu, seorang manusia masih dimungkinkan untuk merasakan perasaan orang lain. Ada sebuah ruang untuk saling mendialogkan kehidupan di sana. Inilah yang bagi Arendt dikatakan sebagai sebuah ruang untuk saling memahami, yaitu "dunia" (Welt). Bagi Arendt, "dunia" di sini lebih dipahami sebagai sebuah "ruang publik" (F. Budi Hardiman, 2002).

Mengikuti alur pemikiran Arendt, agama seperti yang tetap memiliki peranan dalam sebuah tatanan politik, sejauh menjadi sebuah komunitas inklusif yang mau terbuka dan mampu untuk berkomunikasi atau berdialog dengan yang lain di "ruang publik", bukan sebagai sebuah identitas eksklusif di "ruang privat". Agama dalam arti seperti itu dapat menjadi sebuah lembaga intermedier (sebuah organisasi diri) yang menjadi pelindung individu dari kekuasaan dan penguasaan (kebijakan-kebijakan paternalistis pemerintah atau pemaksaan kehendak elite di papan atas). Di sini, menurut Arendt, "ruang antara" itu ditemukan, di mana kebebasan politik itu tersingkap dan komunikasi antara rakyat dan penguasa pun dapat dilakukan. Rakyat tidak lagi menjadi homogen massa yang dikendalikan dari luar dan berhadapan langsung dengan negara (pemerintah). Melainkan, melalui agama sebagai lembaga intermedier (organisasi diri), rakyat mendapatkan kedaulatannya (F. Budi Hardiman, 2001). Jadi, di hadapan negara, agama lebih dipahami sebagai salah satu bentuk organisasi diri warga negara (lembaga intermedier) yang inklusif dan memungkinkan sebuah komunikasi (dialog) politik.

Dalam konteks Indonesia, agama-agama yang ada diharapkan dapat menjadi "lembaga intermedier" (NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, WALUBI, PHDI, MATAKIN, MLKI, dsb.) yang terus berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil dan lemah

**"Jika agama hanya soal  
kepuasan dan kesucian  
pribadi saja, mungkin peristiwa  
Salib yang Aku alami – di mana  
'negara' ikut menentukan  
hidupku dan menghukumku –  
mungkin tak ada maknanya  
lagi bagimu!" \_ Yesus**

yang seringkali suaranya terlupakan dan tidak diperhatikan. Sejahter agama itu selalu memperjuangkan mereka yang tak dapat berhadapan langsung dengan negara, maka agama di sini benar-benar menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk terwujudnya bonum commune (kebaikan bersama) di tengah-tengah negara

#### Penutup

Kesimpulannya, keempat pemikir memiliki pandangan yang berbeda tentang peran agama dalam negara. Machiavelli melihat agama sebagai alat kekuasaan, Kart menekankan uji kelayakan dan nilai universal agama sementara Montesquieu dan Arendt melihat agama sebagai lembaga intermedier yang bisa melindungi individu dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat. Pendekatan yang tepat mungkin harus mempertimbangkan konteks dan pluralitas masyarakat, sejauh mana agama dapat berperan dalam ruang publik, dan sejauh mana nilai nilai agama dapat diakui secara universal. "Kita mau memaknai pendekatan yang mana?" Silakan kita renungkan Jangan-jangan, kita selama ini hanya memahami agama sebagai sebuah bentuk ritual pribadi (privat) – tanpa perlu harus berhadapan dengan persoalan masyarakat di negara. Jika itu yang terjadi, mungkin Yesus akan menantang dan berkata, "Jika agama hanya soal kepuasan dan kesucian pribadi saja, mungkin peristiwa Salib yang A alami – di mana 'negara' ikut menentukan hidupku dan menghukumku – tak ada maknanya lagi bagimu!"

